

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DI KABUPATEN PELALAWAN PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH (BPKAD)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH**

**ADISTA NABILA CHAIRUNI**  
**NIM 11970524508**

**PROGRAM STUDI S1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2023**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Nama : Adista Nabila Chairuni  
 Nim : 11970524508  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

**DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING**

**Virna Museliza, SE, M.Si**  
 NIP. 130 712 073

Mengetahui

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



**Dr. Hj. Mahyarni, SE,MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Adista Nabila Chairuni  
Nim : 11970524508  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul skripsi : Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  
Tanggal Ujian : 25 Mei 2023

**Tim Penguji**

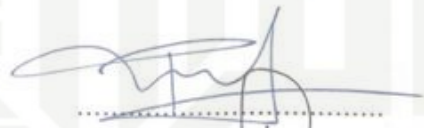
Ketua penguji  
Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA.



Penguji I  
Ikhwani Ratna, S.E., M.Si.



Penguji II  
Rony Jaya, S.Sos., M.Si.



Sekretaris  
Devi Deswimar, S.Sos., M.Si.



UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADISTA NABILA CHAIRUNI  
 NIM : 11970524508  
 Tempat/Tgl. Lahir : PANGKALAN KEPINCI, 26 APRIL 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 DI KABUPATEN PECELAWAN PADA BIDANG PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 MEI 2023  
 Yang membuat pernyataan



ADISTA NABILA CHAIRUNI

NIM : 11970524508

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PELALAWAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

OLEH:

**ADISTA NABILA CHAIRUNI**  
**11970524508**

Pajak merupakan salah satu penerimaan terpenting yang dipungut oleh Negara, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama. Salah satu pungutan pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah pada kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dan hambatan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017-2022. Dalam pandangan George Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi subjek dan objek, baik itu seseorang, lembaga, komunitas, dan lain sebagainya. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdapat tujuh informan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Hambatan terbesar dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh para wajib pajak yang kurang menyadari kewajiban perpajakannya dan kurang pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri. Dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam pemungutan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bidang Penagihan Keberatan dan Banding pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan, seperti Program Jemput Bola, Mengutus 2 petugas pada setiap desa untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Penghapusan denda dengan regulasi dan dasar hukum agar wajib pajak dapat membayar pelunasan Pajak Bumi.

***Kata Kunci: Pajak bumi dan bangunan, Kebijakan Pajak.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### LAND AND BUILDING TAX COLLECTION IMPLEMENTATION IN PELALAWAN REGENCY AT REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY (BPKAD)

BY:

**ADISTA NABILA CHAIRUNI**  
**11970524508**

*Tax is one of the most important revenues collected by the State, the results of which are used for the common good. One of the regional tax collections is land and building tax. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Pelalawan Regency. The purpose of this study was to determine the implementation of the land and building tax revenue policy in increasing regional income at the regional financial and asset management agency (BPKAD) Pelalawan Regency office and the obstacles to land and building tax revenue in 2017-2022. In George Edwards III's view, policy implementation is influenced by four factors, namely (1) communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) bureaucratic structure. The type of research that the author uses is qualitative research with a descriptive approach, which describes the condition of the subject and object, be it a person, institution, community, and so on. The research subjects in this study were seven informants. The results obtained in this study are that the biggest obstacle in collecting land and building tax is caused by taxpayers who are less aware of their tax obligations and lack knowledge about land and building tax itself. In overcoming obstacles that arise in the collection and payment of Land and Building Tax, there have been several efforts made by the Objection Collection and Complaint Division at the Regional Financial and Asset Management Agency in Pelalawam Regency, such as the Pick-up Ball Program, sending 2 officers to each village for tax collection. Land and Building, Elimination of fines with regulations and legal basis so that taxpayers can pay land tax payments.*

**Kata Kunci:** *Tax, property tax, tax policy.*

UIN SUSKA RIAU



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamhamdulillahhirabbil'alamin* segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PELALAWAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terkhusus penulis ucapkan kepada Ayah saya Lamin dan Almh. Ibu Neny Triana yang telah menjadi orangtua terbaik, yang selalu memberikan cinta, perhatian, motivasi, nasehat, kasih sayang dan doa yang tak bisa penulis balaskan. Serta tak lupa terimakasih untuk kakakku Refani Aulia Palupi, adikku Muhamad Zidan Fahrezi dan Amira Fauziyah Amanda karena telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu DR. Mahyani, SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Adiminstrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Adiminstrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, M.A selaku pembimbing akademis penulis dan Dosen Konsultasi Penulis
7. Ibu Virna Museliza, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikann motivasi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
8. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan
9. Terima kasih kepada seluruh staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah bersedia serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada informan yang telah memberikan izin, serta informasi untuk memberikan data.
10. Terima kasih kepada sahabat saya Teddy Kurniawan yang telah bersedia dan membantu penulis dan selalu memberikan support serta semangat dalam pengerjaan skripsi ini



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Lisa Nuria Sara, Rosa Lina Ramadhani, Nofa Khairiyyah yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama perkuliahan. Sukses selalu untuk kita kedepannya sahabat-sahabatku
12. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku Agnes Sukmawati, Miftahul Jannah, Salsadila Juwita dan Rusnemi Putri Aprilia yang selalu setia menemani penulis serta memberikan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini
13. Terima kasih kepada mba Media Septiola dan mba Lisa Nuria Saara yang selalu memberikan semangat, motivasi serta sponsor kepada penulis hingga selesainya skripsi ini
14. Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah menemani penulis, yang telah turut memberikan doa serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhir kata dengan selesainya penelitian, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan semua pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 12 Juni 2023  
Penulis

Adista Nabila Chairuni  
NIM. 11970524508



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Konsep Implementasi.....	12
2.1.1 Model Implementasi Kebijakan .....	15
2.1.2 Proses Implementasi Kebijakan .....	16
2.1.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan.....	17
2.2 Konsep Kebijakan.....	18
2.3 Konsep Pajak Bumi dan Bangunan.....	20
2.4 Konsep Pendapatan Daerah .....	21
2.5 Pandangan Islam .....	22
2.6 Definisi Konsep .....	23
2.7 Penelitian Terdahulu .....	24
2.8 Konsep Operasional .....	28
2.9 Kerangka Berpikir.....	29
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4 Informan Penelitian.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisa Data .....	33
<b>BAB IV    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan.....	35
4.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan .....	37
4.2.1 Visi dan Misi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan .....	39



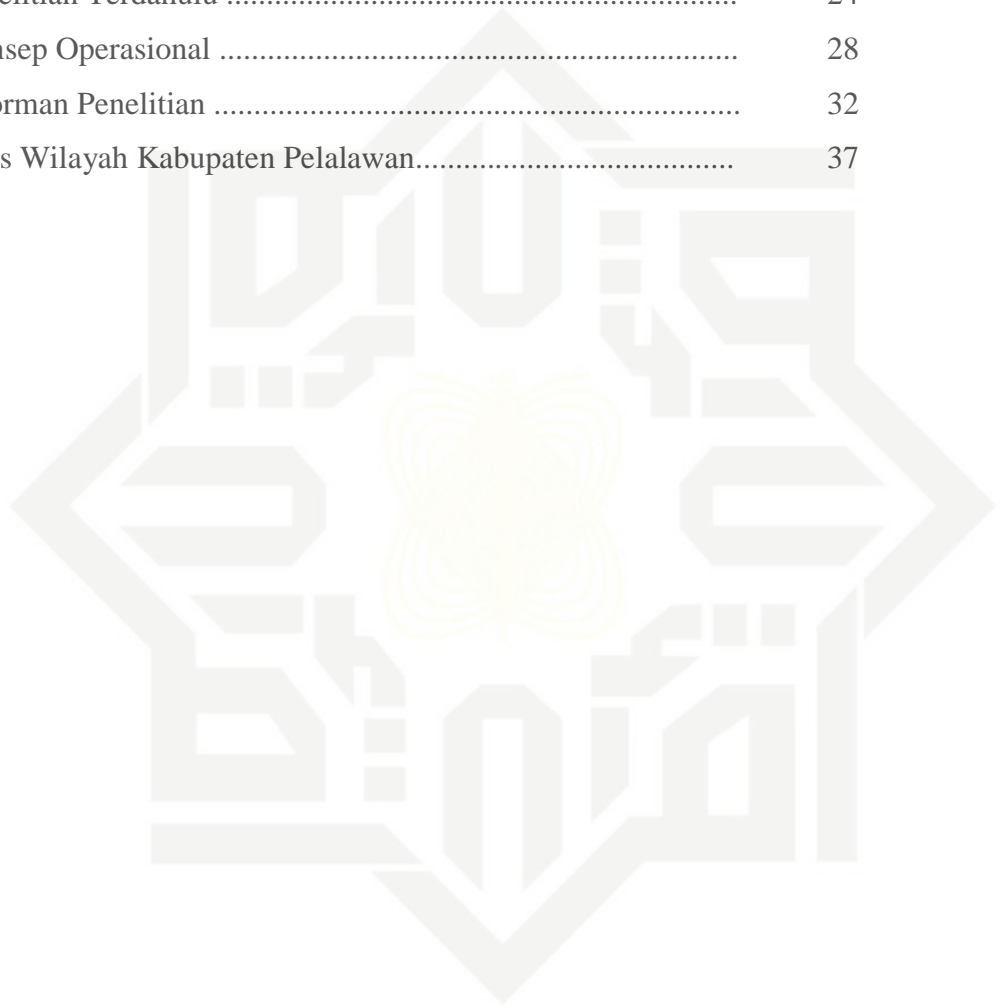
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2	Struktur Organisasi.....	40
4.2.3	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan .....	40
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
5.1	Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).....	42
5.1.1	Komunikasi .....	43
5.1.2	Sumberdaya .....	51
5.1.3	Disposisi .....	58
5.1.4	Struktur Birokrasi .....	63
5.2	Hambatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017-2022 Tidak Mencapai Target.....	69
5.2.1	Komunikasi .....	69
5.2.2	Sumberdaya .....	69
5.2.3	Disposisi .....	70
5.2.4	Struktur Birokrasi .....	72
<b>BAB VI PENUTUP</b>		
6.1	Kesimpulan .....	73
6.2	Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2022 .....	9
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 2.2	Konsep Operasional .....	28
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	32
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan.....	37



UIN SUSKA RIAU

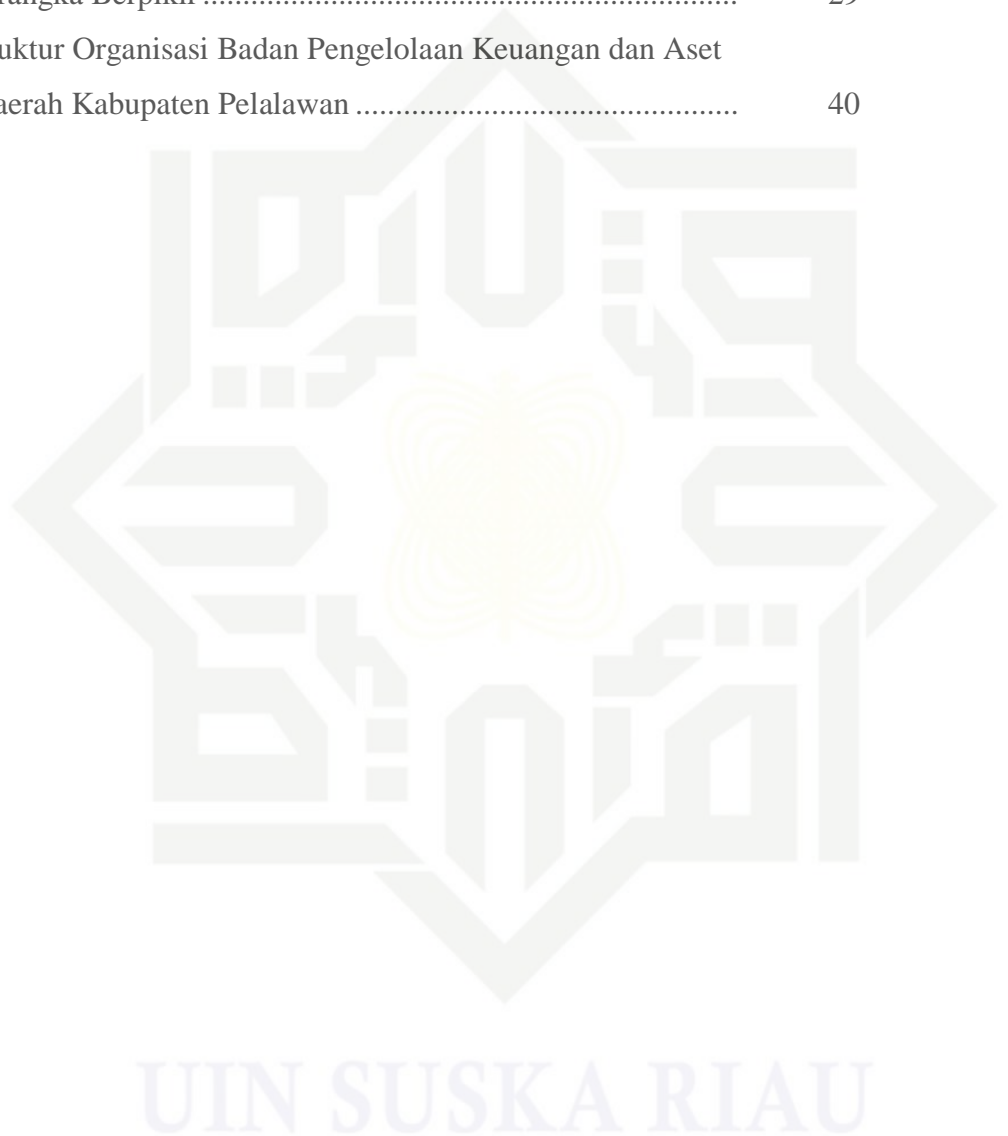
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.....	8
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan .....	40





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Peran pajak dalam pembangunan dirasa sangat penting, karena sebagian besar dana yang digunakan untuk membangun bangsa Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Oleh karena itu dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Untuk mendukung tujuan tersebut, diperlukan peraturan pendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Sumber dana berupa pajak yang ditempatkan oleh pemerintah merupakan bagian dari perwujudan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk pembangunan. Karena meskipun partisipasi pemerintah sangat besar, kedisiplinan dan dedikasi aparatur dalam penyelenggaraan pembangunan, partisipasi dan dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab I Pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah sumbangan wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau aparatur pemerintah yang bersifat memaksa. Atas dasar undang-undang, tanpa adanya imbalan atau ganti rugi langsung dan digunakan untuk kebutuhan wilayah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan yang nyata bagi pemerintah daerah. Daerah berhak mengatur, memperoleh dan memelihara aspek tertentu dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang hasilnya dikelola 100% (seratus persen) oleh pemerintah daerah sendiri.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Salah satu pungutan pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas bumi dan bangunan yang timbul karena adanya manfaat dan kedudukan sosial ekonomi seseorang atau badan yang berhak atau memperoleh manfaat darinya. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur oleh (UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan) tentang perubahan atas (UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan). Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dialihkan kepada Pemerintah kabupaten/kota.

Pajak merupakan salah satu penerimaan terpenting yang dipungut oleh Negara, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama. Dana pajak dialokasikan ke hampir semua sektor, salah satu sektor yang dialokasikan menggunakan dana pajak adalah dana insentif yang diberikan ke masing-masing daerah. Dana tersebut akan digunakan oleh masing-masing daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Menurut (Mardiasmo, 2011:1), pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sangat penting untuk peningkatan penerimaan negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib itu sendiri.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan, sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target penerimaan yang ditetapkan.

Diantara jenis pajak yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penggunaan uang pembayar pajak mencakup segala hal mulai dari pengeluaran pegawai hingga mendanai proyek pembangunan fasilitas umum, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Pajak bagi suatu negara menjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





sangat dominan dan menunjang berjalannya pemerintahan dan negara, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam membayar pajak.

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), antara lain Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Data yang diterima tidak akurat, Alamat Wajib Pajak tidak jelas dan Nama Wajib Pajak telah banyak berubah sedangkan SPPT yang tertulis masih atas nama Wajib Pajak yang sama.

Kualitas sumber daya manusia yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten perlu di tingkatkan dari sisi kompetensinya, untuk itu sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk dapat memperlancar daripada proses pengelolaan perpajakan, sehingga penegakan hukum dalam perpajakan dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, dimana petugas fungsional seperti petugas penilai pajak bumi dan bangunan, petugas pemeriksa pajak beserta petugas juru sita pajak selama ini belum ada. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan masih minimnya sosialisasi ke masyarakat terkait pentingnya penerimaan pajak dari sektor pajak bumi dan bangunan yang mana bisa mengakibatkan tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan, dan wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dan belum semua wajib pajak mengetahui proses daripada aturan yang berlaku dalam penerbitan SPPT sehingga proses administrasi belum sepenuhnya lancar sesuai harapan karena masih ada kendala yang bersifat eksternal sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pajak PBB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kendala-kendala tersebut merupakan hal yang harus segera ditangani dan diselesaikan, karena kendala-kendala inilah yang akan menyebabkan realisasi penerimaan sulit mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga bisa dikatakan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini tidak terlepas dari beberapa hal atau faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga kedua faktor ini akan bisa mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam pembangunan Kabupaten Pelalawan dari sektor pajak, Begitupun halnya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai pihak yang berwenang dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan dan memegang peranan penting dalam pembangunan Kabupaten Pelalawan. Saat ini Kabupaten Pelalawan aktif melakukan perbaikan jalan, trotoar, taman kota, serta pembangunan gedung perkantoran. Untuk mengimplementasikan pembangunan ini, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana tersebut adalah hasil pajak bumi dan bangunan.

Pendapatan daerah sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan pendapatan daerah lain yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan yang bersumber dari daerah, pemerintah hendaknya meningkatkan sumber pendapatan yang bersumber dari daerah, dimana pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu dari pendapatan yang bersumber dari daerah yaitu pajak daerah. Dengan demikian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pajak bumi dan bangunan merupakan komponen yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pelalawan.

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan memberantas kemiskinan, menciptakan dan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat, memelihara atau melestarikan sumber daya alam agar bermanfaat bagi masa kini, dan masa depan. Dengan demikian, pemerintah daerah yang mendapat pelimpahan kewenangan otonomi dari sektor perkotaan dan perdesaan memiliki kewajiban untuk melakukan proses pemungutan pajak dari masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya yang melekat, yang kemudian dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing. sebagai bagian dari mekanisme pemungutan pajak yang akan diberlakukan.

Salah satu peranan pembayaran pajak adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan membiayai belanja daerah. Mengharuskan masyarakat untuk membayar pajaknya secara tertib memiliki makna tersendiri bagi pembangunan daerah dimana pembangunan daerah merupakan upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan dapat dilihat secara fisik maupun non fisik sebagai aspek pendapatan, kesempatan kerja, bidang kegiatan ketika wilayah berada dalam kondisi yang sangat kompetitif.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengeluarkan kebijakan terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Masing-Masing pegawai harus melakukan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan agar realisasi pajak dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tercapai diatas 85%. Selain itu Bupati Pelalawan juga mengutus 2 orang dari setiap desa untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan dari rumah ke rumah atau biasa disebut dengan jemput bola. Dua orang petugas dari setiap desa diambil dari putra desa setempat sehingga dapat mengetahui lokasi dan alamat rumah wajib pajak dan memudahkan dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bnagunan tersebut.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat dengan BPKAD Kabupaten Pelalawan merupakan salah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dimana bertanggungjawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan umum unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah.

Dalam urusan Pajak Bumi dan Bangunan yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding spesifiknya yaitu pada Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berikut penulis akan melampirkan Gambar Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

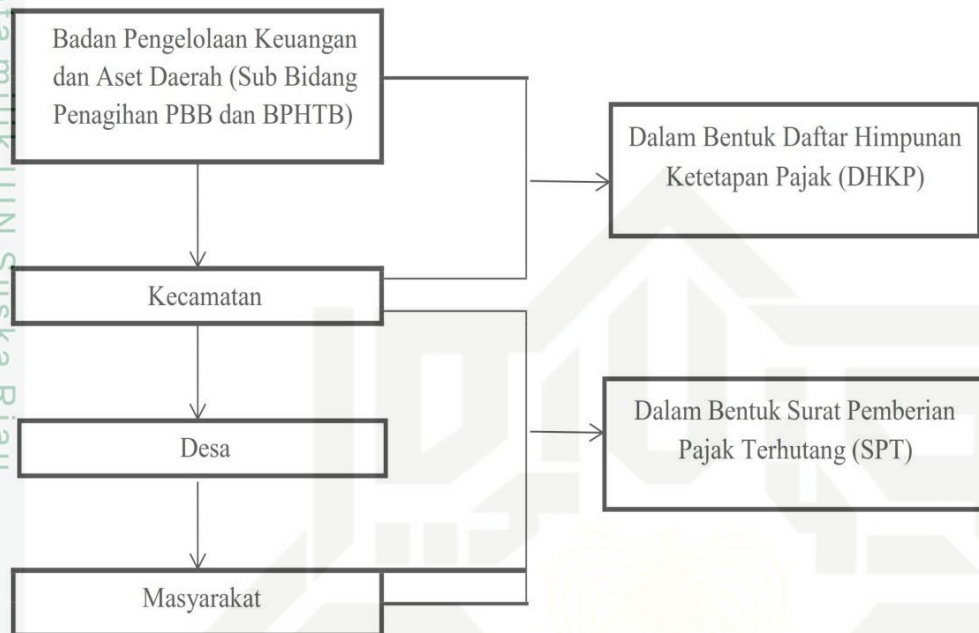
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Gambar 1.1** Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.



**Sumber:** *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan*

Mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan menggunakan system official assisment karena pendataan, teguran atau sanksi, dan pemungutan merupakan peran pemerintah, meskipun dalam hal pembayaran, masyarakat selalu dapat membayar sendiri dengan datang ke BPKAD pemerintah, meskipun dari sudut pandang Dalam hal pembayaran, masyarakat selalu dapat membayar sendiri dengan datang ke BPKAD.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang pengaruhnya yang sangat besar terhadap penerimaan negara. Berikut penulis akan melampirkan Pajak Bumi dan Bangunan yang terealisasi pada tahun 2017 sampai tahun 2022 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stratagem UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2022**

No	Tahun	Jumlah WP	Target	Jumlah WP yang Bayar	Jumlah Realisasi	Jumlah WP yang Tidak Bayar	Jumlah Tidak Terealisasi
1	2017	79.504	13.358.099.176	58.296	11.231.194.435	21.208	2.126.904.741
2	2018	79.580	14.178.416.713	56.234	12.142.257.001	23.346	2.036.159.712
3	2019	69.100	16.930.029.040	52.352	15.068.844.967	16.748	1.861.184.073
4	2020	80.688	20.577.979.850	56.627	17.337.925.552	24.061	3.240.054.298
5	2021	94.209	22.576.583.292	64.441	19.681.047.827	29.768	2.895.535.465
6	2022	119.875	26.264.212.429	71.636	22.802.804.747	48.239	3.461.407.682

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan*

Menurut data yang diterima di atas maka bisa kita lihat bahwa data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan mengenai data pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul penelitian dengan judul **“Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya yang memaparkan masalah yang terjadi, sehingga dalam penelitian ini dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ?
2. Apa Hambatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2017-2022 tidak mencapai target?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017-2022.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat penelitian saya adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini untuk memberikan manfaat maupun pengetahuan tentang meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan

#### 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca, dalam hal yang berkaitan mengenai “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH (BPKAD)”

- a. Bagi Pembaca diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program sarjana s1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan Administrasi Negara sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)

### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan landasan teori yang berlandaskan pembahasan penelitian ini, yang disertai hipotesis juga variabel yang diteliti.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta metode analisa data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat objek yang akan diteliti, struktur dan aktivitas perusahaan.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis membahas dan menguraikan hasil-hasil penelitian dari permasalahan, sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Implementasi

Pengertian implementasi menurut Kadir dalam Rahmat (2017) adalah kegiatan yang menguji informasi dan mengimplementasikan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses pengujian antara konsep dan konsep atau antara teks dan konteks. Selain itu, menurut Fullan, implementasi adalah proses mengambil ide, program, atau aktivitas baru ke dalam tindakan dengan harapan orang lain dapat menerimanya dan melakukan perubahan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses menilai, menilai dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, sehingga mengevaluasi apakah program tersebut perlu dievaluasi atau tidak.

Berbagai ahli telah mengemukakan beberapa teori tentang implementasi kebijakan, antara lain teori George C. Edward dalam Wurnongodkk (2019) yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, antara lain:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mengandaikan bahwa pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group) untuk mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasinya tidak akan berjalan efektif jika pelaksana



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakannya. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, misalnya penerapan pengetahuan dan sumber daya keuangan.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, demokrasi. Jika pelaksana memiliki pola pikir yang baik, maka pelaksana dapat mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan keinginan pengambil keputusan. Jika pelaksana memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu kegiatan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang menentukan apakah suatu kebijakan bersangkutan dengan kepentingan publik dan dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa mungkin saja tahap perencanaan dan perumusan kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun apabila optimalisasi tersebut tidak diperhitungkan pada tahap implementasi, maka tentunya apa yang diharapkan menjadi tidak jelas dari produk politik. Pada akhirnya dapat dipastikan bahwa pada tahap penilaian kebijakan, penilaian akan menghasilkan bahwa formulasi dan implementasi kebijakan tidak sejalan, implementasi kebijakan tidak seperti yang diharapkan, bahkan menjadikan produk politik sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut duo Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Aha (2020) menegaskan bahwa “implementasi kebijakan terungkap secara linier dari kebijakan publik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variabel yang termasuk sebagai variabel yang mempengaruhi dan terlibat dalam proses kebijakan publik adalah:

- a. Implementasi dan kegiatan komunikasi antar organisasi.
- b. Karakteristik dan agen pelaksana/ implementor.
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
- d. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

Implementasi kebijakan dilakukan untuk mencapai kinerja yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan antara berbagai faktor. Suatu kebijakan menetapkan standar dan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam pandangan Weimer dan Vining (2007 : 396) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

- a) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
- b) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan

### 2.1.1 Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkan kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan.

Pada umumnya, model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan. Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan “Implementation as a Political and Administrative Process”. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan meliputi:

1. Interest affected, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan,
2. Type of benefits, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan,
3. Extend of change envision, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas,
4. Site of decision making, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan,
5. Program implementer, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan
6. Resources committed, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

## 2.1.2 Proses Implementasi Kebijakan

Proses Implementasi Kebijakan Implementasi megacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola oprasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan soial. Dalam tataran praktis, implementasi kebijkan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan

### 2.1.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

## 2.2 Konsep Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar perencanaan pelaksanaan kerja, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan aturan dan hukum. Sementara undang-undang dapat mengamanatkan atau melarang suatu perilaku (misalnya undang-undang yang mewajibkan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan tersebut hanyamemandu arah tindakan yang paling mungkin menghasilkan hasil yang diinginkan.

Kebijakan dapat merujuk pada proses pengambilan keputusan penting organisasi, termasuk mengidentifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan memilihnya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politik, manajerial, keuangan atau administratif untuk mencapai tujuan yang eksplisit.

Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan pemerintah yang diambil sebagai solusi atas masalah publik. Berikut definisi kebijakan publik menurut beberapa ahli sehingga memiliki maksud dan pengertian yang sama dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian ini. Thomas R, Dye mengatakan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kemudian Dye mengatakan bahwa jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objective) dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan sekedar pernyataan kehendak pemerintah atau pejabat pemerintah.

Solichin Abdul Wahab menyebut istilah politik sendiri masih kontroversial dan menjadi ajang perdebatan para pakar. Maka untuk memahami istilah politik, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari administrasi.
3. Kebijakan meliputi perilaku dan harapan.
4. Kebijakan mencakup kelambanan atau adanya tindakan.
5. Kebijakan biasanya memiliki hasil akhir yang ingin dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik eksplisit maupun implisit
7. Politik muncul dari proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan tersebut mencakup hubungan antar organisasi dan intra organisasi.
9. Kebijakan publik, meski tidak eksklusif, adalah tentang peran kunci lembaga pemerintah.
10. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### 2.3 Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan jasa, yang dapat dilihat secara langsung, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan atas bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB merupakan pajak kebendaan yang besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu tanah, /tanah dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah untuk menentukan besaran pajak (dengan memperhatikan sistem pemungutan official assessment system). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan bendanya yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya bagi Indonesia di bidang ekonomi dan fiskal akan menumbuhkan iklim demokrasi yang lebih terbuka, jujur dan adil. Pemberian otonomi ini mengakibatkan penyerahan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan dari Negara kepada Pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan serta berdasarkan Undang-undang nomor 01 tahun 2002 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah serta peraturan daerah Kabupaten Pelalawan nomor 01 tahun 2011 tentang pajak daerah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.4 Konsep Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah yang berada di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat diketahui sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang berada di dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah maka semakin besar pula kemampuan keuangan yang tersedia bagi daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Sumber pendapatan daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya sendiri yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan tersendiri, sumber pendapatan daerah lain yang sah. Pendapatan asli daerah dianggap cukup untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerah jika persentase pencapaiannya melebihi 70% dari total penerimaan PAD.

Banyak cara untuk meningkatkan PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan potensi PAD-nya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD agar maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud intensifikasi bersifat retributif, yaitu menghitung potensi seakurat mungkin agar target penerimaan dapat mendekati potensinya, sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic university of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

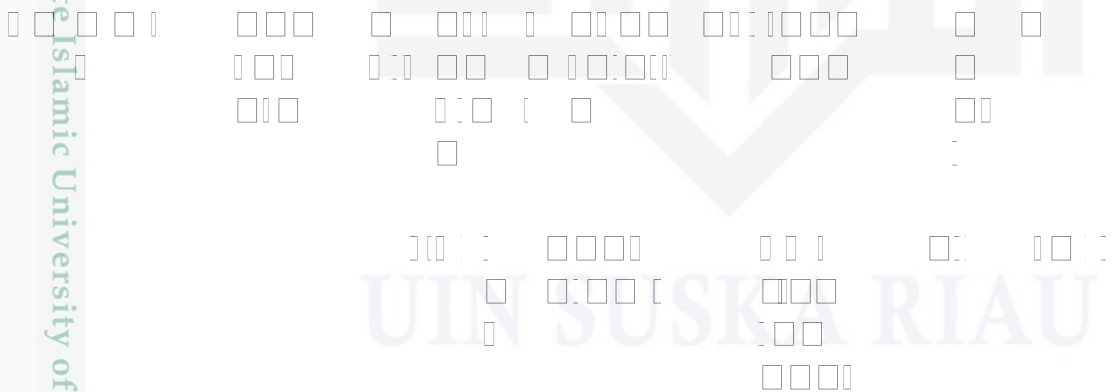
cara ekstensifikasi dilakukan dengan menggali sumber tujuan perpajakan atau dengan merekrut wajib pajak baru.

Pendapatan daerah dimaksud berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lainnya. Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang dihimpun sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

**2.5 Pandangan Islam**

Kata pajak dalam bahasa Arab disebut Adz-Dharibah yang berartipungutan yang dipungut kepada rakyat oleh para pemungut pajak. Menurut Imam Al Ghazali, pajak adalah apa yang berdaulat (pemerintah Muslim)mengenakan pada orang kaya dengan mengambil dari mereka apa yang dianggap cukup (kebutuhan rakyat dan negara pada umumnya) ketika tidak ada uang di perbendaharaan.

Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut:



Terjemahnya: *”Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan menegakkan keadilan bagi orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”*

Prinsip pemungutan pajak dalam nilai keadilan adalah zakat dan sistem perpajakan harus memastikan bahwa hanya orang kaya dan makmur yang memiliki kelebihan yang menanggung beban utama. Prinsip penting disini adalah

bahwa pajak dan zakat hanya dipungut pada orang kaya, baik muslim maupun non



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah [2] ayat

219 :

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْبَخْسَ مِنْكَ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْغِيظُ يَخْتَلِفُونَ  
 فِي الْبَيْنِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُرْتَدُونَ وَاللَّهُ يَخْتَارُ  
 لِمَنْ يَشَاءُ فِئْتًا مِمَّنْ يَدْرَأُ عَنْكَ لِلْإِسْلَامِ إِذَا  
 دُخِلَ فِي الْقُلُوبِ وَأَمْرٌ عَلِيمٌ أَعْلَمُ  
 بِمَا فِي الصُّدُورِ

Terjemahan: *“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Dalam kedua hal itu terdapat dosa-dosa besar dan manfaat-manfaat tertentu bagi manusia. Namun dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepada Anda apa yang (harus) mereka belanjakan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang dibutuhkan). Maka Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu dapat berfikir.”*

### 2.6 Definisi Konsep

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa definisi konsep yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan mengimplementasikan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi (Kadir, 2017)
2. Kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjadipedoman dan dasar perencanaan pelaksanaan kerja, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok swasta, dan individu (KBBI).
3. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2012).

4. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Mardiasmo, 2013).

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Hendry Andri	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan	Jurnal Wedana Volume VII, No.2 Oktober 2021	Pada penelitian ini membahas permasalahan mengenai Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diteliti di Desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan. Jenis penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah</li> <li>2. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)</li> <li>3. Kabupaten Pelalawan</li> <li>4. Jenis penelitian ini menggunakan</li> </ol>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
2.	Nanda Muhammad Shauqie Al-Qadrie	Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak	Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 edisi Juni 2016	Pada penelitian ini membahas permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan bangunan yang di teliti di kota Potianak. Jenis penelitian ini menggunakan metode Kualitatif	an metode Kualitatif 1. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah 2. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 3. Kabupaten Pelalawan 4. Jenis penelitian ini menggunakan metode Kualitatif
3.	Hesti Pratiwi, Muhaimin, Wa Ode Rayyani	Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Jurnal Riset Perpajakn Vol.3, Nomor 1, Mei , 2020	Pada penelitian ini membahas permasalahan mengenai Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan	1. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk





© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
4.	Putri Kemala Dewi Lubis	Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Jurnal Unimed, Volume.6 6 No.01, April 2018	Pada penelitian ini membahas permasalahan mengenai Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah yang di teliti di Kota Medan. Jenis penelitian ini menggunakan metode Kualitatif	1. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah 2. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
5.	Tenny Putri Astutik, Mochamad Makmur, Suwondo	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang	Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No.1, Hal. 47-52	Pada penelitian ini membahas permasalahan mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang diteliti di Kota Malang. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif	<p>Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan</p> <p>3. Jenis penelitian ini menggunakan metode Kualitatif</p> <p>1. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah</p> <p>2. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan</p> <p>3. Jenis penelitian ini menggunakan metode Kualitatif</p>

## 2.8 Konsep Operasional

Menurut Moh. Nazir (2005:126) definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.

**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	1. Komunikasi	a. Transmisi Penyaluran Komunikasi yang baik
		b. Kejelasan Komunikasi yang diterima
		c. Konsistensi
	2. Sumberdaya	a. Staff sebagai Sumber Utama dalam Implementasi
		b. Informasi dalam Implementasi Kebijakan
		c. Wewenang yang bersifat Formal
		d. Fasilitas Fisik
	3. Disposisi	a. Pengangkatan Birokrat
		b. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sumber: Teori Implementasi George C. Edward III dalam Subarsono (2016:90)

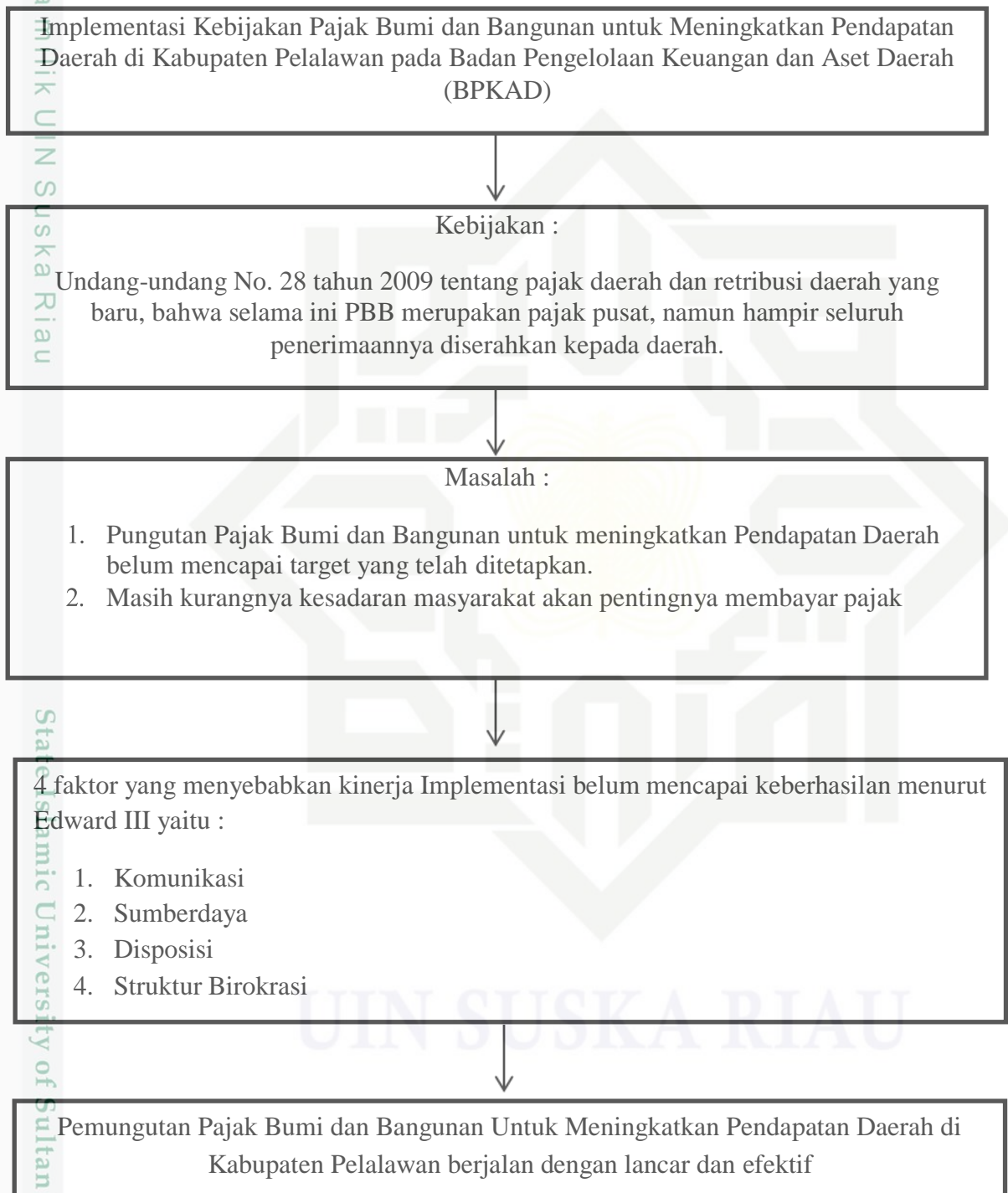
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi subjek dan objek, baik itu seseorang, lembaga, komunitas, dan lain sebagainya serta yang mengacu pada hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dan memberikan argumen atau pendapat tentang apa yang ada di lapangan dan terkait dengan konsep operasional, kerangka pemikiran dan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis melakukan penelitian disana ialah karena peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan judul peneliti, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti ditempat tersebut. objek penelitian ini adalah penulis ingin meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November sampai bulan Februari.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Isamir University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau mereka yang membutuhkan. Data primer disebut juga data asli atau data baru.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan penelitian sebelumnya.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian utama digunakan untuk mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti maka informan sering disebut sebagai responden karena hanya memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh peneliti. Informan penelitian memberikan informasi secara mendalam yang dibutuhkan peneliti. Informan penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Keterangan
1.	Kabid Penagihan, keberatan dan banding	1 orang
2.	Kasubid Penagihan PBB dan BPHTB	1 orang
3.	Staff sub Penagihan PBB dan BPHTB	3 orang
4.	Wajib Pajak	2 orang
Jumlah		7 orang

*Sumber : Informan Penelitian*

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang perlu diteliti, dan juga jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya lebih banyak. kecil/sedikit. Untuk mengumpulkan data ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bentuk bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Panduan wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

#### 2. Observasi

Pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penelititurun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ruang, tempat, pelaku, kegiatan, objek, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

Metode observasi merupakan cara terbaik untuk memantau perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah mencari atau mengikuti pola. Analisis data kualitatif adalah pemeriksaan sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungan dengan keseluruhan. Bogdan dan Biklen (2007) menyatakan bahwa analisis data adalah proses meneliti dan menyusun secara sistematis hasil wawancara, catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang semua yang dikumpulkan dan untuk memungkinkan penyajian dari apa yang ditemukan. (Gunawan, 2013: 210)

Dalam melakukan analisis data penelitian mengacu pada beberapa langkah yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, dalam (Silalhi 2010: 339), ada tiga teknik analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlanjut sepanjang penelitian, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memperhalus, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan,



dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

Pengurangan tidak perlu diartikan sebagai data kuantitatif.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berupa catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan tabel.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten Kampar. Kabupaten pelalawan ini berdiri pada tahun 1999, yang dibentuk berdasarkan UU No.53 tahun 1999 kemudian di resmikan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibukota Kabupaten Pelalawan. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Pelalawan adalah nama sebuah kerajaan melayu . wilayah kerajaan ini berada di bagian hilir Sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachruddin (1811-1822). Berdasarkan cerita dahulunya nama Sungai Kampar adalah Laut Ombun.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 53 tahun 2009 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/ kota di Provinsi riau yang di resmikan oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal 12 oktober 2009 di Jakarta dan operasional pemerintahan daerah tanggal 05 desember 2009, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 13.256,70. Km dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 (empat) kecamatan, yaitu : langgam, pangkalan kuras, bunut dan kuala Kampar. Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administrative terdiri dari 12 wilayah Kecamatan yang meliputi 93 Pemerintahan Desa dan 12 Pemerintahan Kelurahan. 35 Desa berda adi pinggir sungai, 8 desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbatasan dengan laut, 50 desa berda di daerah perkebunan, PIR Trans dan pedalaman, 12 desa terdapat di kawasan kota sedang dan kecil . yang mana keberadaan nya kabupaten pelawan ini sangat menunjang dilakukan investasi dn berbagi sektor terutama perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan lainnya.

Kabupaten pelalawan terletak di pesisir pantai timur pulau Sumatra antara 1,25 lintang utara sampai 0.20 lintang selatan dan antara 100,42 Bujur Timur sampai 103,28 Bujur Timur denagna batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Kecamatan Sungai Apit Kecamatan Siak Kabupaten Siak Dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Kateman, Kecamatan Manda, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Dan Kecamatan Rengan, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, Kualu Cenaku , Kabupaten Indragiri Hulu Serta Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singgingi
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Dan Kecamatan Tenayan Raya Dan Kecamatan Rumbai Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur, Berbatasan Dengan Provinsi Kepulauan Riau .

Luas wilayah Kabupaten pelalawan kurang lebih 1.325.Ha atau 13,21 dari luas wilayah provinsi riau ( 9.456.160 Ha) Kabupaten pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatn terluas adalah teluk Meranti yaitu 426.600 Ha (13,03%) dan yang paling kecil adalah kecamatan pangkalan kerinci dengan luas 19.250 Ha atau 1,45% dari luas kabupaten pelalawan.

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan**

No	Nama Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Langgam	145.000	10,94
2.	Pangkalan Kerinci	19.250	1,45
3.	Bandar Sei Kijang	32.080	2,42
4.	Pangkalan Kuras	118.500	19
5.	Ukui	130.200	10
6.	Pangkalan Lesung	50.620	4
7.	Bunut	41.470	3
8.	Pelalawan	149.600	11
9.	Bandar Petalangan	37.330	3
10.	Kuala Kampar	80.640	6
11.	Kerumutan	96.380	7
12.	Teluk Meranti	424.670	32
Jumlah		1.325.670	100

*Sumber : Badan Pusat Statistik Pelalawan, Tahun 2022*

#### **4.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperjelas melalui Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan umum unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core) yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah.

Selanjutnya pada pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwasanya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan Daerah memiliki kewajiban meliputi:

1. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel:
2. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat dan
3. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Dalam perjalanannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan mengalami beberapa kali perubahan yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan merupakan Badan Daerah dengan type A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 78 Tahun 2016 telah menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

#### 4.2.1 Visi dan Misi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

##### 1. Visi

Inovasi Menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera)

##### 2. Misi

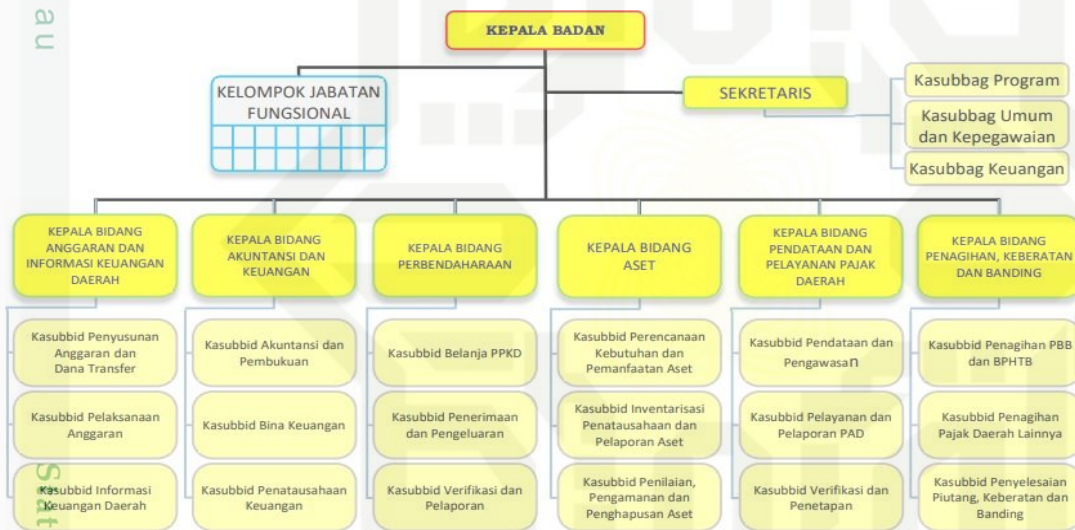
- a. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu.
- b. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
- c. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi.
- d. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
- e. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa.
- f. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan

Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan.

- g. Menciptakan Ketertiban dan Keamanan, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Pelalawan yang terkait dengan pencapaian misi.

#### 4.2.2 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan



#### 4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

##### Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

1. Tugas

Bada Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Fungsi

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang memuat program kerja operasional sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penjabaran Program kerja operasional dalam bentuk kegiatan yang disusun secara tahunan dimuat dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). Renja tersebut juga menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.





## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Dalam pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bidang Penagihan Keberatan dan Banding pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan salah satunya adalah Program Jemput Bola, Mengutus 2 petugas pada setiap desa untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Penghapusan denda dengan regulasi dan dasar hukum agar Wajib Pajak dapat membayar pelunasan pajak Bumi dan Bangunan. Mekanisme pemungutan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Bidang Penagihan Keberatan dan Banding pada Badan Pengelolaan Keuangan an Aset Darrah bisa dikatakan lebih mudah dan cepat karena selain sistem pembayaran Jemput Bola masyarakat juga bisa membayar melalui bank yang tersedia atau datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Pelalawan

Hambatan terbesar dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh para wajib pajak yang kurang menyadari kewajiban perpajakannya dan kurang pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri. Padahal pajak bumi dan bangunan sama pentingnya seperti pajak kendaraan bermotor. Kurangnya kesadaran ini membuat pemerintah harus melakukan beberapa cara atau inovasi sehingga membuat masyarakat sadar akan pentingnya pajak bumi dan bangunan tersebut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan pada saat melakukan penelitian, ada beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat memberikan tambahan insentif kepada pegawai pelaksana teknis lapangan sebagai motivasi kerja, karena keberhasilan Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pelalawan sangat tergantung pada kinerja kerja mereka.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat melengkapi fasilitas-fasilitas penerapan pelayanan agar dapat mempermudah masyarakat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih maksimal menyampaikan informasi-informasi yang substansial kepada jajaran dibawahnya, sehingga masyarakat menyadari adanya kemudahan dalam proses Pemungutan Pajak.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

QS-Al-Baqarah ayat 219

QS-Al Mumtahan ayat 8

### Buku

Abidin, Said Zainal 2004, *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta

Awang, Azam dan Wijaya Mendra, 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru

Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Burton, Ilyas. 2011. *Hukum Pajak. Edisi 5*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Kamaroellah, A.R. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah. *Jurnal ekonomi dan perbankan*, hal 84- 103.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penertbit Andi: Yogyakarta

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI  
Mardiasmo. 2016. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*.

Wahab, Solichin Abdul, 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara, Jakarta

### Jurnal

Adelina, R. (2013). *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1-19.

Jumiati, I.E. 2019. *Efektifitas Program Kawasan Desa Mandiri Pangan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang*. *Jurnal Administrasi Publik Vol 10(2)*.

Lubis, D.K.P. 2018. *Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah*. *Jurnal akuntansi, keuangan dan perpajakan indonesia*, hal 79-88.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahman, A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi.

Republik Indonesia. 1985. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Diakses 29 Juli 2020

Samudra, Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.

Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.. Jakarta Penerbit PT. Raja Grafindo Persada*

Soemitro, Rahmat. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PT Eresco

Tarigan, W.K. 2013. *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Emba, hal 282-291.

Widayanti, W. (2020). *Peran Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah* . Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat

**Perundang - undangan**

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 *Tentang Retribusi dan Pajak Daerah*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 *Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa dasar pelaksanaan pemungutan PBB di Kabupaten Pelalawan ?
2. Bagaimana mekanisme pendataan objek dan subjek PBB di Kabupaten Pelalawan
3. Bagaimana mekanisme penetapan dan penagihan PBB- di Kabupaten Pelalawan?
4. Bagaimana mekanisme pembayaran PBB yang dilakukan wajib pajak Kabupaten Pelalawan?
5. Bagaimana kondisi penerimaan PBB di Kabupaten Pelalawan dari tahun 2017-2022?
6. Berapa jumlah Objek PBB yang ditetapkan oleh BPKAD Kabupaten Pelalawan ?
7. Berapa jumlah perbandingan pokok massal PBB yang ditetapkan oleh BPKAD Kabupaten Pelalawan ?
8. Apa penyebab penerimaan PBB masih belum dapat mencapai target ?
9. Apa faktor-faktor yang menghambat belum tercapainya target penerimaan PBB?
10. Apa saja upaya yang dilakukan BPKAD untuk meningkatkan penerimaan PBB?
11. Apa saja kendala yang dihadapi BPKAD dalam upaya peningkatan penerimaan PBB?
12. Bagaimana langkah-langkah penyusunan strategi yang dilakukan oleh BPKAD untuk meningkatkan penerimaan PBB?
13. Apa saja strategi yang digunakan oleh BPKAD untuk meningkatkan penerimaan PBB?
14. Bagaimana Implementasi Kebijakan terhadap upaya peningkatan penerimaan PBB di Kabupaten Pelalawan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



15. saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan peningkatan

penerimaan PBB yang disusun BPKAD Kabupaten Pelalawan?

16. Bagaimana kemampuan pegawai BPKAD dalam pengelolaan PBB di Kabupaten Pelalawan?

17. Bagaimana pengaruh ketersediaan dana terhadap kinerja BPKAD dalam pengelolaan PBB?

18. Bagaimana kondisi dan pengaruh keberadaan sarana operasional terhadap kinerja BPKAD dalam pengelolaan PBB?

19. Bagaimana Sosialisasi pengalihan PBB dari dana perimbangan menjadi pajak daerah di Kabupaten Pelalawan?

20. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan terhadap penerimaan PBB?

21. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sleman dalam membayar PBB?

22. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar PBB tepat waktu ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




20220050183  
SPPT PBB  
BUKTI MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2022**

AKUN : 2022 - PELALAWAN

NOP : 04.040.009.000-0534

<b>LETAK OBJEK PAJAK</b> PART 2 RW 1 SUNGAI SOLOK KUALA KAMPAR PELALAWAN			<b>NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK</b> NORWATI PARIT GANTUNG DUSUN PERUMAHAN 8 SUNGAI SOLOK PELALAWAN NPWP :	
<b>OBJEK PAJAK</b>	<b>LUAS (M2)</b>	<b>KELAS</b>	<b>NJOP PER M2 (Rp)</b>	<b>TOTAL NJOP (Rp)</b>
BUMI	2,469	087	10,000	24,690,000
BANGUNAN	72	027	429,000	30,888,000
<b>NJOP sebagai dasar pengenaan PBB</b> =				55,578,000
<b>NJOP TKP (NJOP Tidak Kena Pajak)</b> =				10,000,000
<b>NJOP untuk penghitungan PBB</b> =				45,578,000
<b>PBB yang Terhutang</b> = 0,1% X				45,578,000
<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)</b> (EMPAT PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RUPIAH)				45,578
<b>TGL. JATUH TEMPO</b> : 30 SEPTEMBER 2022 <b>TEMPAT PEMBAYARAN :</b> 1. BPKAD KAB. PELALAWAN 2. BANK RIAUKEPRI 3. BANK MANDIRI 4. BRI			<b>PANGKALAN TERBUKA</b> : 2 APRIL 2022  DEVITSON S. HARUDDIN, SH. MH 197.12032000121004	

**KONFIRMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

NOP : 04.040.009.000-0534

TAHUN	POKOK	DENDA (*)	JUMLAH	HASIL KONFIRMASI (Pilih Salah Satu)
2020	45,578	0	45,578	
2021	45,578	0	45,578	
<b>Total yang belum dibayar</b>			<b>91,156</b>	

**Keterangan :**  
 a = Betul dan belum bayar  
 b = Salah karena sudah bayar (bukti terlampir)  
 c = Salah karena double SPPT (bukti terlampir)  
 d = Objek pajak tidak ada (surat ket. terlampir)  
 e = Wajib pajak tidak ada (surat ket. terlampir)

**Keterangan :**  
 \*) Denda dihitung jika dibayar pada bulan September dengan perhitungan sebesar 2% / bulan.

Pelalawan,  
 (.....)  
 Nama Terang WP/RT

NORWATI NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan : 000-0534-7 NOP : 2022 45,578 SPPT Tahun/Rp. :		Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang
---	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		20220077121
<b><u>SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)</u></b>		
Tempat Pembayaran :		
Tela menerima pembayaran PBB Th. <input type="text"/>		dari :
Nama Wajib Pajak :		
Letak Objek Pajak : Kecamatan		
		: Desa / Kelurahan
Nomor SPPT (NOP) :		
Sejumlah : Rp. <input type="text"/>		
Tanggal Pembayaran :		Tanda Terima dan Cap Bank/Pos
Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/>		
Lembar untuk BPKAD		
		20220077121
Tanggal Pembayaran :		Tanda Terima dan Cap Bank/Pos
Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/>		
Lembar untuk Bank		
		20220077121
<b>PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN</b>		
<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		
<b><u>SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)</u></b>		
Tempat Pembayaran :		
Tela menerima pembayaran PBB Th. <input type="text"/>		dari :
Nama Wajib Pajak :		
Letak Objek Pajak : Kecamatan		
		: Desa / Kelurahan
Nomor SPPT (NOP) :		
Sejumlah : Rp. <input type="text"/>		
Tanggal Pembayaran :		Tanda Terima dan Cap Bank/Pos
Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/>		
Lembar untuk Kecamatan		



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52782  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-601/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Tanggal 16 Januari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

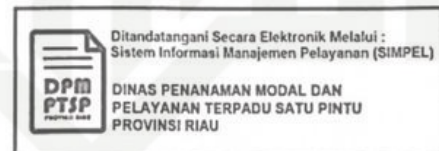
1. Nama	:	ADISTA NABILA CHAIRUNI
2. NIM / KTP	:	11970524508
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BAGUNAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
7. Lokasi Penelitian	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 Januari 2023



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0570/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 12 Januari 2023 M  
 Sifat : Biasa 19 Jumadil Akhir 1444 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
 Yth. Virna Museliza, SE, M. Si  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Adista Nabila Chairuni  
 NIM : 11970524508  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Penasebangan Lembaga,



*[Signature]*  
 Dr. Kama Suddin, S.Sos, M. Si  
 NIP. 197101200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6208/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Pra Riset

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 Desember 2022 M  
 12 Jumadil Awwal 1444 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Adista Nabila Chairuni  
 NIM. : 11970524508  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan  
 Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan pada Badan Pengelolaan Keuangan  
 Dan Aset Daerah (BPKAD)"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan  
 memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Kamaluddin, S. Sos, M. Si  
 NIP. 19590101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-601/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 12 Januari 2023 M  
 19 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Adista Nabila Chairuni  
 NIM. : 11970524508  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



*Mahyarni*

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU





**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpmsp.pelalawan@gmail.com  
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991  
PANGKALAN KERINCI

**REKOMENDASI**  
Nomor : 504/DPMPSTP/2023/0027

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52782 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

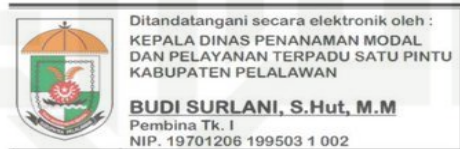
- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : <b>ADISTA NABILA CHAIRUNI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : 11970524508   |
| 3. Program Studi     | : Administrasi Negara   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : Jl. Arbes   |
| 6. Judul Penelitian  | : Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) |
| 7. Lokasi Penelitian | : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci  
Pada tanggal 20 Februari 2023



**Tembusan :**

1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau Di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
- Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
 KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA KABUPATEN PELALAWAN  
 Telp./Fax. (0761) 493776 - PANGKALAN KERINCI  
 Email : bpkad.pelalawankab@gmail.com

Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 27 Februari 2023

Nomor : 800/BPKAD/2023/109  
 Lamp : -  
 Perihal : Tanggapan Atas Penelitian  
 di BPKAD Pelalawan

Kepada :  
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan  
 Ilmu Sosial UIN Suska Riau  
 di -  
 Pekanbaru

Menanggapi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : 504/DPMPTSP/2023/0027 tanggal 20 Februari 2023, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan atas nama :

Nama : ADISTA NABILA CHAIRUNI  
 NIM : 11970524508  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Jenjang : S1  
 Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH KAB. PELALAWAN



DEVITSON SAHARUDDIN, SH, MH  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19721203 200012 1 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hindangi Undang-Undang

Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## BIOGRAFI PENULIS

**Adista Nabila Chairuni** merupakan anak kedua dari Bapak Lamin dan Almh Ibu Neny Triana. Lahir di Pangkalan Kerinci pada 26 April 2001. Perjalanan akademis penulis dimulai sejak tahun 2006 di Taman Kanak-Kanak Taruna Andalan Pangkalan Kerinci. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah dasar di SD Taruna Andalan Pangkalan Kerinci pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang

sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Plus Taruna Andalan di Pangkalan Kerinci. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang Pendidikan ke SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, melalui jalur SBMPTN penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa di Jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis Menyelesaikan teori perkuliahan selama 7 semester dan satu semester untuk penyusunan skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)”

Dengan Rahmat Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan ibu Virna Museliza, SE, M.Si bertepatan pada tanggal 25 Mei 2023, penulis ujian Munaqasyah dan dinyatakan “LULUS” dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos)